



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkembangan Kecamatan Karangtengah akan mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan yang akan mempengaruhi RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan lahan kosong untuk dialihkan menjadi rumah. Berdasarkan kondisi eksisting tata guna lahan di Kecamatan Karangtengah menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap peta kawasan LSD dan LP2B, dimana terdapat aktivitas tambak yang berkembang di kawasan pertanian sehingga berpotensi mengurangi luas lahan pertanian yang seharusnya dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan wilayah. Secara umum, peruntukan hunian mempertimbangkan kondisi dan kemampuan lahan, sehingga perkembangan hunian tidak menimbulkan tekanan terhadap kawasan yang memiliki keterbatasan fisik maupun kawasan lindung. Oleh karena itu, Kecamatan Karangtengah perlu memperhatikan beberapa hal dalam pengembangan kawasan permukiman:

1. Perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Karangtengah menunjukkan adanya kecenderungan yang tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan tata ruang serta keberadaan kawasan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis kesesuaian lahan, dimana terdapat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi tersebut berpotensi terus terjadi seiring dengan perkembangan kawasan permukiman dalam beberapa tahun ke depan apabila tidak dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal.
2. Analisis daya dukung dan daya tampung lahan menunjukkan bahwa beberapa wilayah belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, wilayah yang tidak memenuhi standar sebaiknya tidak diprioritaskan sebagai kawasan pengembangan permukiman. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi karakteristik penduduk, kondisi lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu yang akan datang, termasuk potensi terjadinya segregasi permukiman.
3. Sebagian wilayah Kecamatan Karangtengah memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan permukiman. Sebaliknya, wilayah yang tidak memenuhi kriteria pengembangan perlu dibatasi pemanfaatannya guna menjaga keseimbangan lingkungan serta menghindari tekanan terhadap kawasan yang memiliki keterbatasan fisik maupun potensi kerawanan bencana. Dengan demikian, arahan pengembangan hunian di

Kecamatan Karangtengah diharapkan dapat mendukung pertumbuhan permukiman yang lebih terarah, berkelanjutan, serta selaras dengan kondisi kawasan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

4. Peta rencana alokasi lahan permukiman di Kecamatan Karangtengah tahun 2031 yang dihasilkan sudah mempertimbangkan pola ruang rencana, namun bukan merupakan peta murni alokasi lahan permukiman.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan untuk mendapatkan lokasi pengembangan kawasan hunian, maka diperlukan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman yang lebih terarah dan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pihak terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pengembangan permukiman di Kecamatan Karangtengah pada masa yang akan datang.

1. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian

Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), khususnya pada wilayah yang telah mengalami alih fungsi menjadi tambak. Upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi lahan pertanian serta mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Karangtengah.

2. Pengarahan Pengembangan Permukiman Secara Terencana

Pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Karangtengah sebaiknya diarahkan pada kelurahan yang telah memenuhi kriteria kemampuan lahan, kesesuaian lahan permukiman, serta daya dukung dan daya tampung wilayah. Wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rencana perlu menjadi fokus dalam perencanaan pengembangan permukiman agar pembangunan dapat berlangsung lebih terarah dan efisien.

3. Penguatan Kebijakan Penataan Ruang Berkelanjutan

Perencanaan pengembangan hunian di masa mendatang perlu memperhatikan keseimbangan antara kawasan terbangun, ruang terbuka hijau, serta kawasan lindung agar pembangunan wilayah tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara analisis kemampuan lahan, kebijakan tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang perlu diperkuat dalam proses perencanaan wilayah.

4. Keterbatasan Data Penelitian

Penelitian rencana alokasi lahan permukiman memiliki keterbatasan data, sehingga menghasilkan peta hasil akhir yang kurang maksimal berupa peta fisik alam dan rawan bencana banjir, dikarenakan keterbatasan data yang menyebabkan belum diketahui tingkat kapasitas kemampuan lahan dan tingkat kebencanaan banjir di Kecamatan Karangtengah.